



## Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

### Pengaruh Transparansi, Target Anggaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hamidah<sup>a</sup>, Dewi Pebriyani<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup> Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang, Sumatera Barat, 25131, Indonesia.

Email: [hamidahunp@gmail.com](mailto:hamidahunp@gmail.com)<sup>a</sup>, [dewipebriyani@fe.unp.ac.id](mailto:dewipebriyani@fe.unp.ac.id)<sup>b</sup>

---

#### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received 27-01-2026

Revised 03-02-2026

Accepted 05-02-2026

**Kata Kunci:**

Transparansi;  
Target Anggaran;  
Partisipasi  
Masyarakat;  
Akuntabilitas  
Dana Desa

**Keywords:**

Transparency;  
Budget Target;  
Community  
Participation;  
Accountability

#### A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi, spesifikasi target anggaran, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintahan nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada aparatur nagari yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, spesifikasi target anggaran, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian spesifikasi target anggaran sebagai faktor yang memperkuat akuntabilitas dalam konteks pemerintahan nagari, yang masih terbatas dikaji pada penelitian sebelumnya, khususnya di Sumatera Barat. Temuan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi, kejelasan sasaran anggaran yang terukur, serta keterlibatan aktif masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

#### A B S T R A C T

*This study aims to examine the effects of transparency, budget target specification, and community participation on the accountability of village fund management in nagari governments of Padang Pariaman Regency. The research adopts a quantitative approach using a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to nagari officials directly involved in village fund management and analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 25. The results indicate that transparency, budget target specification, and community participation have a positive effect on the accountability of village fund management. The novelty of this study lies in examining budget target specification as a key determinant of accountability within the context of nagari governance, which has received limited attention in previous studies, particularly in West Sumatra. These findings highlight that transparency, clear targets, and participation enhance accountable fund management.*

## PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Peran tersebut semakin diperkuat melalui implementasi otonomi desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan nilai-nilai tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka otonomi tersebut, Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Wati, 2021).

Dalam perspektif teori Stewardship, pengelolaan dana desa menempatkan aparatur desa sebagai steward yang diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat sebagai principal. Aparatur desa tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga memiliki kewajiban pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang berjenjang (Budiana et al., 2019). Secara normatif, pendekatan ini mengandaikan bahwa pengelola dana desa akan bertindak secara profesional, jujur, dan berorientasi pada kepentingan publik. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa yang belum berjalan secara optimal.

Permasalahan tersebut tercermin dari fenomena nasional yang menunjukkan meningkatnya kasus korupsi dana desa. Data Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa penyimpangan dana desa terus terjadi dengan pola yang relatif berulang, seperti mark-up proyek pembangunan, manipulasi anggaran, serta lemahnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana kepada masyarakat (Media, K.C., 2024). Pola penyimpangan ini mengindikasikan adanya kelemahan sistemik dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di tingkat pemerintahan desa, sehingga menegaskan pentingnya penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa (Chomariyah et al., 2016).

Fenomena pengelolaan dana desa juga menarik untuk dikaji pada tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini menunjukkan realisasi anggaran dana desa yang mencapai seratus lima puluh delapan persen (158 persen) dari pagu awal, yaitu sebesar seratus koma lima tiga (100,53) miliar rupiah dari pagu enam puluh tiga koma enam dua (63,62)

miliar rupiah. Kondisi ini tergolong tidak lazim, mengingat sebagian besar daerah justru menghadapi permasalahan penyerapan anggaran yang rendah atau *under-realization*. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya dinamika khusus dalam mekanisme perencanaan, realokasi, dan pengawasan anggaran yang perlu dikaji lebih lanjut untuk menilai apakah mencerminkan fleksibilitas pengelolaan yang positif atau justru menunjukkan kelemahan dalam sistem perencanaan dan pengendalian anggaran (Chomariyah et al., 2016).

Permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Padang Pariaman semakin terlihat melalui sejumlah kasus konkret yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kasus mencuat di Kenagarian Sikucua Utara, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, yang melibatkan dugaan penggelapan dana desa oleh pejabat Wali Nagari. Kasus tersebut terungkap setelah Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman melakukan penyelidikan dan menemukan penyimpangan dalam pengelolaan dana proyek Alokasi Dana Desa tahun dua ribu delapan belas (2018), baik dari aspek pelaksanaan kegiatan maupun administrasi keuangan, dengan kerugian sekitar dua puluh tiga juta rupiah (Redaksi, 2019). Selain itu, kasus korupsi dana desa juga terjadi di Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, yang diproses secara hukum pada tanggal enam April dua ribu dua puluh satu (2021). Dalam kasus ini, pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu koma enam (1,6) tahun serta denda sebesar lima puluh juta rupiah, dengan temuan berupa manipulasi dokumen administrasi dan penggunaan kwitansi yang diduga fiktif (Sumatera Barat News, 2021). Kasus-kasus tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya analisis yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, khususnya dalam konteks sistem nagari yang memiliki karakteristik kelembagaan berbeda dengan desa pada umumnya. Akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara periodik (Mustofa, 2012). Selain akuntabilitas, partisipasi masyarakat juga merupakan elemen penting dalam memastikan pengelolaan dana desa yang transparan dan bertanggung jawab, karena partisipasi mencakup aspek pengawasan dan penyaluran aspirasi publik. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali masih bersifat seremonial dan belum mencapai substansi pengawasan yang efektif (Sulistyowati et al., 2022).

Di samping itu, aspek perencanaan anggaran juga memegang peranan penting, khususnya terkait spesifikasi target anggaran. Spesifikasi target anggaran merujuk pada tingkat kejelasan dan ketepatan dalam menetapkan sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi dana desa, baik dari sisi output maupun outcome (Dewi,

2020). Ketidakjelasan sasaran anggaran berpotensi melemahkan proses evaluasi dan pertanggungjawaban, sehingga berdampak pada rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaruh transparansi, spesifikasi target anggaran, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan akuntansi sektor publik serta memberikan manfaat praktis bagi pemerintah desa dan pembuat kebijakan dalam upaya memperkuat tata kelola dana desa yang akuntabel.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Teori *Stewardship***

Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa pengelola organisasi (*steward*) cenderung bertindak untuk kepentingan principal dengan mengutamakan tanggung jawab dan komitmen moral dibandingkan kepentingan pribadi (Donaldson & Davis, 1997). Dalam konteks pengelolaan dana desa, aparatur desa bertindak sebagai *steward* yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola dana publik secara akuntabel (Budiana et al., 2019). Teori ini relevan untuk menjelaskan pentingnya transparansi, kejelasan target anggaran, dan partisipasi masyarakat dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, pencapaian kinerja, serta kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku (Mardiasmo, 2009). Dalam akuntansi sektor publik, akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam memastikan bahwa dana publik dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup dimensi kinerja dan moral. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menjelaskan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan yang didanai oleh dana desa (Mustofa, 2012). Dengan demikian, tingkat akuntabilitas yang tinggi mencerminkan kualitas tata kelola keuangan desa yang baik.

### **Transparansi**

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami

mengenai pengelolaan keuangan publik. Transparansi dalam pengelolaan dana desa memungkinkan masyarakat mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa (Ridha Fajri, 2021). Keterbukaan informasi ini berperan penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, transparansi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan oleh pemerintah desa, maka semakin besar peluang terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa (Kristianten, 2006).

### **Spesifikasi Target Anggaran**

Spesifikasi target anggaran merujuk pada tingkat kejelasan dan ketepatan dalam penetapan sasaran anggaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Sasaran anggaran yang dirumuskan secara jelas dan spesifik akan memudahkan pelaksana dalam memahami tujuan kegiatan serta mempermudah proses evaluasi kinerja (Kenis, 1979). Dalam pengelolaan dana desa, spesifikasi target anggaran menjadi dasar penting dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program. Kejelasan sasaran anggaran juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas, karena memungkinkan adanya pengukuran kinerja yang objektif dan transparan (Mulyadi, 2014). Ketidakjelasan target anggaran berpotensi menimbulkan kesenjangan antara perencanaan dan realisasi, sehingga melemahkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Dalam pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Mardiasmo, 2018). Partisipasi yang efektif juga memperkuat kontrol sosial terhadap aparatur desa dalam mengelola dana desa. Namun, partisipasi masyarakat tidak selalu berjalan optimal. Partisipasi masih bersifat seremonial dan belum mencapai fungsi pengawasan yang substantif (Sulistiyowati et al., 2022). Oleh karena itu, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Rumusan Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang yang didukung oleh penelitian terdahulu serta teori-teori yang telah dijelaskan, hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- H1: Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- H2: Spesifikasi target anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal untuk menganalisis pengaruh transparansi, spesifikasi target anggaran, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian dilakukan pada pemerintahan nagari di Kabupaten Padang Pariaman dengan unit analisis aparatur nagari yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa. Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur, yang disusun berdasarkan indikator variabel dan diukur menggunakan skala Likert lima tingkat. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 25. Model penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots \dots \dots 1$$

Dimana Y adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa, X1 adalah transparansi, X2 adalah spesifikasi target anggaran, X3 adalah partisipasi masyarakat,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$  adalah koefisien regresi dan  $\varepsilon$  adalah variabel gangguan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Data

Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan nagari di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran 100 (seratus) kuesioner kepada aparatur nagari yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa. Seluruh kuesioner berhasil dikembalikan dan layak diolah, sehingga tingkat pengembalian mencapai 100 (seratus) persen. Hasil uji validitas menunjukkan seluruh item pernyataan memiliki nilai korelasi lebih besar dari r tabel sebesar 0,197, sehingga dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha dengan keseluruhannya melebihi batas minimum 0,70. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut menggunakan SPSS versi 25.

## Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			300
Normal Parameters <sup>a,b</sup>		Mean	.0000000
		Std. Deviation	5.18301672
Most Differences	Extreme	Absolute	.046
		Positive	.046
		Negative	-.024
Test Statistic			.046
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			

(Sumber: Data diolah SPSS, 2025)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov terhadap unstandardized residual, diperoleh nilai Test Statistic sebesar 0,046 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

## Uji Multikolonieritas

Tabel 2. Uji Multikolonieritas

Model		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.	Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-2.151	1.400		-1.537	.125		
	TOTALX1	.464	.036	.479	12.748	.000	.983	1.018
	TOTALX2	.505	.051	.374	9.904	.000	.976	1.025
	TOTALX3	.553	.051	.410	10.932	.000	.987	1.013

a. Dependent Variable: TOTALY

(Sumber: Data diolah SPSS, 2025)

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas, seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10, sehingga model regresi dinyatakan terbebas dari masalah multikolonieritas.

**Uji Heterokedastisitas**

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskadastisitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Std. Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			Tolerance VIF
1 (Constant)	1.926	.807		2.388	.018	
TOTALX1	.059	.021	.162	2.806	.005	.983 1.018
TOTALX2	.034	.029	.067	1.165	.245	.976 1.025
TOTALX3	.020	.029	.040	.691	.490	.987 1.013

a. Dependent Variable: ABS\_RES

(Sumber: Data diolah SPSS, 2025)

Berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser, sebagian besar variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga varians residual dinyatakan konstan dan model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas serta layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

**Analisis Regresi Berganda**

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			Tolerance VIF
1 (Constant)	-2.151	1.400		-1.537	.125	
TOTALX1	.464	.036	.479	12.748	.000	.983 1.018
TOTALX2	.505	.051	.374	9.904	.000	.976 1.025
TOTALX3	.553	.051	.410	10.932	.000	.987 1.013

a. Dependent Variable: TOTALY

(Sumber: Data diolah SPSS, 2025)

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada tabel *diatas*, diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$Y = -2,151 + 0,464X_1 + 0,505X_2 + 0,553X_3 + e.....2$$

Model regresi tersebut menunjukkan bahwa:

1. Koefisien transparansi sebesar 0,464 menunjukkan bahwa peningkatan transparansi satu satuan akan meningkatkan akuntabilitas sebesar 0,464 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
2. Koefisien spesifikasi target anggaran sebesar 0,505 menunjukkan bahwa peningkatan kejelasan target anggaran satu satuan akan meningkatkan

akuntabilitas sebesar 0,505 satuan.

3. Koefisien partisipasi masyarakat sebesar 0,553 menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat satu satuan akan meningkatkan akuntabilitas sebesar 0,553 satuan, dan koefisien ini merupakan yang terbesar, sehingga partisipasi masyarakat menjadi variabel yang paling dominan dalam meningkatkan akuntabilitas dibandingkan transparansi dan spesifikasi target anggaran.

## Uji Hipotesis

### Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4 sebelumnya, hasil uji t menunjukkan bahwa transparansi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan koefisien 0,464 dan signifikansi 0,000, sehingga H1 diterima. Spesifikasi target anggaran (X2) juga berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,505 dan signifikansi 0,000, sehingga H2 diterima. Partisipasi masyarakat (X3) berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,553 dan signifikansi 0,000, sehingga H3 diterima. Berdasarkan nilai Beta, transparansi merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi akuntabilitas, diikuti partisipasi masyarakat dan spesifikasi target anggaran.

### Uji Simultan (Uji f)

Tabel 5. Hasil Uji f

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11497.562	3	3832.521	141.234	.000 <sup>b</sup>
	Residual	8032.235	296	27.136		
	Total	19529.797	299			

a. Dependent Variable: TOTALY

b. Predictors: (Constant), TOTALX3, TOTALX1, TOTALX2

(Sumber: Data diolah SPSS, 2025)

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 141,234 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ , sehingga transparansi, spesifikasi target anggaran, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, model regresi dinyatakan layak (fit) dan dapat digunakan untuk memprediksi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Tabel 6. Hasil Uji R<sup>2</sup>

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.767 <sup>a</sup>	.589	.585	5.209

a. Predictors: (Constant), TOTALX1, TOTALX3, TOTALX2

(Sumber: Data diolah SPSS, 2025)

Nilai R sebesar 0,768 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel independen dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan nilai R Square sebesar 0,589 yang berarti 58,9 persen variasi akuntabilitas dapat dijelaskan oleh model. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,585, Standard Error of the Estimate sebesar 3,00122, dan Durbin–Watson sebesar 1,947 menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan prediksi yang baik dan terbebas dari autokorelasi.

## Pembahasan

### Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,464 dengan nilai signifikansi 0,000 dan Beta sebesar 0,479, sehingga H1 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa, semakin meningkat pula akuntabilitasnya karena masyarakat memiliki akses informasi untuk melakukan pengawasan. Hasil ini sejalan dengan *Stewardship Theory* yang menegaskan bahwa aparatur pemerintah sebagai *steward* akan bertindak lebih bertanggung jawab ketika terdapat keterbukaan dan kejelasan informasi dalam pengelolaan sumber daya publik (Budiana et al., 2019). wa transparansi anggaran meningkatkan pertanggungjawaban publik, Aprilya (2020) yang menemukan bahwa kejelasan informasi anggaran memperkuat pengendalian dan evaluasi kinerja keuangan desa, serta Avellyni dan Making (2021) yang membuktikan bahwa keterbukaan informasi mendorong peran masyarakat sebagai kontrol sosial dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### Pengaruh Spesifikasi Target Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa spesifikasi target anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan koefisien regresi sebesar 0,505 dan nilai signifikansi 0,000, sehingga H2 diterima. Kejelasan dan keterukuran target anggaran memudahkan aparatur nagari dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi penggunaan dana desa, sehingga

pertanggungjawaban dapat dilakukan secara lebih terarah. Temuan ini sejalan dengan *Stewardship Theory* yang menegaskan bahwa kejelasan tujuan menjadi pedoman bagi *steward* dalam mengelola sumber daya publik sesuai kepentingan *principal* (Budiana, 2019). Hasil penelitian ini juga konsisten dengan Arta dan Rasmini (2019) yang menyatakan bahwa sasaran anggaran yang jelas meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dewi (2020) yang menemukan bahwa spesifikasi target anggaran memperkuat pengendalian dan evaluasi keuangan desa, serta Pebriyanto dan Sumadi (2021) yang membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berkontribusi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan koefisien regresi sebesar 0,553 dan nilai signifikansi 0,000, sehingga H3 diterima. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menciptakan mekanisme *checks and balances* yang mendorong pemerintah desa bertindak lebih transparan dan bertanggung jawab. Temuan ini sejalan dengan *Stewardship Theory* yang menekankan hubungan kepercayaan antara *steward* dan *principal* dalam pengelolaan sumber daya publik (Budiana, 2019). Hasil penelitian ini juga konsisten dengan Fajri dan Julita (2021) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memperkuat pengawasan publik, Arta dan Rasmini (2019) yang menemukan bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, Andika dan Wati (2021) yang menegaskan peran partisipasi dalam mendorong transparansi, Pahlawan et al. (2020) yang membuktikan bahwa partisipasi berfungsi sebagai kontrol sosial, serta Solikhah dan Hossain (2023) yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam memperkuat akuntabilitas sektor publik.

### **Pengaruh Transparansi, Spesifikasi Target Anggaran, dan Partisipasi Masyarakat secara Simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil uji F menunjukkan bahwa transparansi, spesifikasi target anggaran, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan nilai F hitung sebesar 141,234 dan signifikansi 0,000, sehingga H4 diterima. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,585 menunjukkan bahwa 58,5 persen variasi akuntabilitas dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini memperkuat *Stewardship Theory* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1997 dalam Budiana et al., 2019), bahwa akuntabilitas pengelolaan dana publik akan terwujud melalui keterbukaan informasi, kejelasan tujuan, serta keterlibatan

masyarakat sebagai *principal* dalam mengawasi kinerja *steward*.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi, spesifikasi target anggaran, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan, kejelasan perencanaan, dan keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini terbatas pada penggunaan data kuesioner dengan variabel transparansi, spesifikasi target anggaran, dan partisipasi masyarakat, sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh faktor kontekstual lain yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Saran**

1. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain serta menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam agar analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa lebih komprehensif.
2. Pemerintah desa (nagari) perlu meningkatkan transparansi melalui penyediaan laporan keuangan yang mudah diakses serta menetapkan target anggaran yang jelas dan terukur.
3. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat pembinaan dan pengawasan melalui pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas aparatur desa guna mendorong pengelolaan dana desa yang akuntabel.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alauddin. (2020). *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa*. Jurnal Administrasi Publik, 5(2), 112–124.
- Andika, R., & Wati, L. (2021). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 9(1), 45–57.
- Aprilya, S. (2020). Transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 4(1), 1–12.

- Arta, I. M. P., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(2), 1234–1258.
- Avellyni, D., & Making, J. (2021). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 6(2), 89–101.
- Budiana, I. N., Suryandari, N. N. A., & Sugianto. (2019). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perspektif stewardship theory. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(1), 14–25.
- Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. In G. A. Marcoulides (Ed.), *Modern methods for business research* (pp. 295–336). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Chomariyah, S., Suprapti, E., & Handayani, S. (2016). Good governance dan pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 234–245.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Dewi, N. P. R. C. (2020). Kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 77–90.
- Fajri, R., & Julita. (2021). Transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 3(2), 98–109.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan pemantauan kasus korupsi dana desa*. Jakarta: ICW.
- Kenis, I. (1979). Effects of budgetary goal characteristics on managerial attitudes and performance. *The Accounting Review*, 54(4), 707–721.
- Kristianten. (2006). *Transparansi anggaran pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Krisnawati, N. K. A., Ramantha, I. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425–1438.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi.
- Media, K. C. (2024). Kasus korupsi dana desa terus meningkat. *Kompas.com*.
- Mustofa, A. (2012). *Manajemen keuangan sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulyadi. (2014). *Akuntansi manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pahlawan, R., Yusralaini, & Silfi, A. (2020). Partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 13(1), 55–66.
- Pebriyanto, D., & Sumadi, K. (2021). Kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas desa. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 7(2), 88–99.

- Pramayoga, I. P. A., & Ramantha, I. W. (2020). Kejelasan sasaran anggaran dan kinerja pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 623–637.
- Redaksi. (2019). Dugaan penggelapan dana desa di Kenagarian Sikucua Utara. *Padang Pariaman News*.
- Ridha Fajri. (2021). Transparansi pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(1), 34–45.
- Solikhah, B., & Hossain, M. (2023). Community participation and public accountability. *Journal of Public Sector Accounting*, 15(2), 101–118.
- Sulistyowati, N., & Nataliawati. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 66–79.
- Sumatera Barat News. (2021). Kasus korupsi dana desa Nagari Sungai Sariak. *Sumbarnews.id*.
- Wati, L. (2021). Dana desa dan akuntabilitas publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 8(2), 120–132.